

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dosen Pengampu : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H
Mata Kuliah/Kelas: Hukum Tata Negara / C

KELOMPOK 7

1. (1312000217) Aprilia Dela Nurul Azizah
2. (1312000171) Okthika Nuril Imamah
3. (1312000159) Romy Ashadin Anhar
4. (1312000214) Rio Aldino Yosevan Silalahi
5. (1312000216) Dhika Arief Ryanto

SEJARAH SINGKAT OMBUDSMAN RI

- Kata ombudsman berasal dari bahasa Skandinavia (Swedia) yang artinya perwakilan.
- Ombudsman berdiri pada tanggal 10 Maret 2000 dengan nama Komisi Ombudsman Nasional (KON)
- KON di bentuk berdasarkan keppres Nomor 44 Tahun 2000
- Kemudian diperkuat oleh UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI
- Ombudsman RI ialah Lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik

DASAR HUKUM OMBUDSMAN RI

1. KEPPRES Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional; lalu diperkuat oleh
2. UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

LANDASAN DIDIRIKANNYA OMBUDSMAN RI

- ✓ Semangat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peran serta masyarakat; dan
- ✓ Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkeadilan dan kesejahteraan yang lebih baik.

PERKEMBANGAN OMBUDSMAN RI SAAT INI

- Kedudukan Ombudsman RI : Lembaga Non-Struktural (LNS).
- Fungsi : Untuk menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah terkait dengan pengawasan pelayanan publik.

Keberadaan Ombudsman RI sampai saat ini telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2020 menempatkan Ombudsman RI posisi kedua sebagai lembaga yang efektif melakukan pemberantasan korupsi. Tentu hal ini dapat dibuktikan terjadinya peningkatan tren pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI setiap tahunnya.

LANJUTAN..

Berdasarkan hasil pengaduan masyarakat ke Ombudsman pada tahun 2018 di negara Swedia, Australia, dan Indonesia menunjukkan jumlah pengaduan masyarakat di Australia lebih banyak dari Indonesia.

- Ombudsman Australia menerima 46.494 pengaduan;
- Ombudsman Indonesia hanya 9.376 pengaduan; dan
- Ombudsman Swedia yang menerima 8.826 pengaduan.

Total jumlah penduduk sebesar 10,05 juta, berbanding dengan Indonesia sebesar 269 juta penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun meningkatkan peran serta masyarakat dan persepsi terhadap Ombudsman, ternyata masih jauh tertinggal dari negara maju tersebut. Sebagaimana landasan pemikiran pembentukan Ombudsman dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat masih belum mencapai titik yang tertinggi.

OPINI/PENDAPAT KELOMPOK

Menurut kelompok kami, memang benar masih ada masyarakat mengira Ombudsman adalah nama orang, perusahaan swasta, atau lembaga swadaya masyarakat bahkan ada juga yang belum pernah mendengar sama sekali kata ombudsman sebelumnya. Tentu ini bukan hal yang mengejutkan, Karena pamor Ombudsman masih kalah dengan lembaga negara pengawas lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan sebagainya. Fenomena seperti ini, menjadi tantangan sendiri bahwa masyarakat masih minim pengetahuan untuk memahami peran sertanya dalam pengawasan pemerintahan.

LANJUTAN..

Karena pada dasarnya masyarakat dapat menggunakan hak-haknya mengawasi pelayanan publik sekaligus meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang dirasa masih jauh dari pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance). Agar mencapai tujuan tersebut, penting untuk menjelaskan sejarah dan perkembangan Ombudsman RI kepada masyarakat saat ini. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka mendapatkan perlindungan hak-hak pelayanan publik dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

SOLUSI

Untuk mengatasinya, sebuah gagasan yang penting diungkapkan adalah agar pendidikan anti maladministrasi dapat diterapkan dalam pembelajaran pada tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Melalui pendidikan maka negara memfasilitasi warga negaranya untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam hak-hak sipil, yaitu keterlibatan warga negara dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sangat berkaitan bahwa Ombudsman RI sebagai lembaga yang menerima pengaduan masyarakat adanya dugaan maladministrasi. Oleh karena itu, tantangan Ombudsman RI tidak hanya pada masih maraknya maladministrasi, tetapi juga peran serta masyarakat yang masih minim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengaduan dengan jumlah penduduk yang berselisih yang begitu sangat besar.

TERIMAKASIH